

BAMBANG SULISTYO

Konflik, Kontrak Sosial, dan Pertumbuhan Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan

RESUME: Pembangunan masyarakat, konflik, dan perang, yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa penting pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan, merupakan ekspresi dari harga diri. Pembangunan masyarakat, sudah barang tentu, dimulai dengan membentuk "polity" (entitas politik), seperti kerajaan atau negara, dengan Raja yang dipilih oleh kepala-kepala "wanua". Bentuk federasi diubah menjadi kerajaan atau kekuasaan yang sentralistik. Ibukota kerajaan selanjutnya dipindahkan dari pedalaman ke pesisir, di muara sungai. Artinya, sistem kekuasaan yang semula berorientasi agraris selanjutnya berorientasi maritim. Sesudah itu, proses pembangunan kerajaan dilakukan dengan jalan ekspansi dan penaklukan, serta mengangkut penduduk negeri taklukan tersebut ke ibukota kerajaan. Proses ekspansi dan penaklukan ini juga menciptakan hubungan perkawinan, dengan menempatkan keluarga bangsawan di negeri "vazal", serta membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan negeri "vazal". Artikel ini membahas tentang perkembangan sejarah Kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 Masehi. Bisa dikatakan bahwa abad ke-17 adalah puncak kebesaran Sulawesi Selatan, terutama bagi suku Bugis, Makassar, dan Mandar. Nilai-nilai yang berkembang pada periode itu masih dapat ditemukan sebagai acuan dan gaya hidup orang-orang Bugis dan Makassar di masa kini.

KATA KUNCI: Konflik, kontrak sosial, kerajaan Gowa-Tallo dan Bone-Soppeng, sistem nilai, perkembangan Islam, dan VOC Belanda.

ABSTRACT: "Conflict, Social Contract, and the Growth of Islamic Kingdoms in South Sulawesi". Community development, conflict, and war, as the background of important events in the 17th century in South Sulawesi, is an expression of self-esteem. Community development, of course, begins with forming a political entity, such as the kingdom or state, the king chosen by the heads of "wanua" (community). The form of federation entity converted into a power centralized kingdom. Royal capital city was then moved from the interior to the coast, at the mouth of the river. It means that the power system initially agrarian-oriented has then changed to the maritime-oriented. After that, the development process of the kingdom is done by using the expansion and conquest, and conquered the inhabitants of the land are transported and moved to the capital city of the kingdom. The process of expansion and conquest also creates marital relationship, by placing a noble family in the country of "vazal" (colonized), and to build cooperation and mutual help with the country of "vazal". This article discusses the historical development of Gowa Kingdom and other kingdoms in South Sulawesi on 17th AD (Anno Domini). It could be said that the 17th century was the peak of the greatness of South Sulawesi, especially for the ethnics of Bugis, Makassar, and Mandar. The values that be developed in that period can still be found as a reference and the lifestyle of the Bugis and Makassar communities in the present.

KEY WORD: Conflict, social contract, the kingdoms of Gowa-Tallo and Bone-Soppeng, value systems, the development of Islam, and Dutch East-Hindia company.

PENDAHULUAN

Abad ke-17 adalah puncak kebesaran Sulawesi Selatan, terutama bagi suku Bugis, Makassar, dan Mandar. Suatu prestasi yang menjadi kebanggaan sebagai suku bangsa. Nilai-nilai yang berkembang pada periode itu masih dapat ditemukan sebagai acuan dan gaya hidup orang-orang Bugis

dan Makassar di masa kini. Nilai tentang "demokrasi" dan "harga diri" berkembang pada periode tersebut. Tidak dapat diingkari bahwa dengan kedua nilai itu, Sulawesi Selatan mencapai puncak kebesarannya.

Sesungguhnya, Gowa dan Tallo yang berhasil memprakarsai kebesaran itu. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Gowa meliputi

Dr. Bambang Sulistyio adalah Dosen dan Ketua Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UNHAS (Universitas Hasanuddin), Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat emel: bambang5ulistyio@yahoo.com

Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan bahkan hingga Kalimantan Utara. Namun etnis Bugis, Bone, meskipun hanya berkuasa sebatas di Sulawesi Selatan saja, namun turut bangga karena dapat menaklukkan wibawa kepemimpinan Gowa.

Abad ke-17, ketika Perang Makassar terjadi, kehidupan dunia seperti yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes, filosof dari Inggris, dengan *homo homini lupus*, yakni mereka yang kuat memakan yang lemah. Dunia tanpa pengakuan kesetaraan politik diantara bangsa-bangsa se-dunia. Belum ada peta wilayah negara yang disepakati oleh seluruh bangsa-bangsa. Liga Bangsa-Bangsa (lahir tahun 1920-an) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (lahir tahun 1940-an), yang mengontrol dan mencegah tindakan sewenang-wenang suatu bangsa atas bangsa lainnya, juga belum ada.

Setiap bangsa berlomba memperkuat militer, memperluas wilayah, dan menjadi bangsa yang unggul. Bangsa yang kuat akan berkuasa, sedangkan yang kalah akan terhina. Nilai-nilai klasik yang berkembang di Eropa, yang menggerakkan terjadinya Perang Troya pada tahun 4,000 silam, juga berkembang di sini. Laki-laki pada masa itu "diburu" oleh nilai keabadian, yakni harga diri. Para raja berambisi untuk menjadi penguasa di atas raja-raja lainnya.

Namun, kondisi di Eropa itu juga berlaku di Sulawesi Selatan. Setiap orang dan kerajaan sangat bangga dengan nilai kebudayaan harga dirinya. Memiliki kekuasaan, serta banyak pengikut dan kaya menjadi dambaan setiap orang dan setiap kerajaan. Kebanggaan ini menjiwai Perang Makassar pada abad ke-17. Komunitas-komunitas kesukuan bangkit mendirikan kerajaan dan menaklukkan negeri lainnya.

Tujuan artikel ini adalah menjelaskan harga diri yang berkembang di dalam Perang Makassar, 1666-1669, yang meliputi konsep dan aplikasinya. Diawali dengan perkembangan kerajaan, sistem sosial, dan semangat perangnya.

DUNIA PENUH KONFLIK

Pada abad-abad yang lalu, sebelum ada tatanan politik yang menjamin kesetaraan

antar bangsa, kehidupan manusia terus-menerus terlibat konflik sepanjang hidupnya. Paus, sebagai pemimpin agama Kristen Katholik, justru memicu perang. Demikian juga para Khalifah Islam, menggunakan agama untuk memperluas kekuasaannya.

Paus terlibat dalam perang perebutan tanah suci Palestina, yang dikuasai oleh Kesultanan Turki Seljuk. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, kepada bangsa Turki, telah membangkitkan semangat Perang Salib pada bangsa Spanyol dan Portugis melawan Islam. Kedua bangsa itu memperluas perang ke Eropa Barat, yakni pada kekhalifahan Islam Kordova di jazirah Iberia.

Pada tahun 1492, Spanyol berhasil menaklukkan Sultan Abu Muhammad Abdullah IX di Granada. Orang-orang Muslim diusir dari Spanyol ke Afrika. Karena jasa kedua bangsa itu akhirnya Paus, yang mengaku sebagai wakil Tuhan di dunia, merestui ekspansi-ekspansi penaklukan mereka ke seluruh penjuru dunia melalui Perjanjian Thordesilas. Oleh karena itu, pelayaran-pelayaran dan perang-perang mereka berdasarkan slogan *Gospel, Gold, and Glory* (injil, emas, dan kejayaan).

Pelayaran-pelayaran mereka bertujuan menyiarkan agama dan mengumpulkan kekayaan. Mereka berupaya menemukan rempah-rempah dari Maluku yang sudah dikenal di Eropa sejak zaman Romawi Kuno. Sebelah barat kepulauan De Verde, di barat Afrika Utara, diakui sebagai wilayah Spanyol; dan sebelah timur sebagai wilayah Portugis.

Demikianlah, Bartolomeus Dias, dalam pelayaran antara tahun 1487-1488, berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika. Vasco da Gama, sesudah berlavar selama dua tahun lebih, menemukan India. Selanjutnya, Alfonso de' Albuquerque, pada tahun 1511, menemukan dan menaklukkan kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, yakni Melaka. Pada sisi yang lain, yakni Columbus dari Spanyol menemukan "benua baru" Amerika, ketika tiba di kepulauan Bahama.

Pelayaran-pelayaran Columbus sesudah

itu dilanjutkan oleh Magelhaens, yang sesudah melintasi Samudera Pasifik tiba di Maluku. Di semua wilayah yang dilalui dan disinggahi oleh kedua bangsa itu dinyatakan sebagai wilayah mereka. Portugis berkonsentrasi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, sedangkan Spanyol berminat pada upaya memperoleh emas.

Pada masa itu, perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan. Portugis, dalam upaya menguasai rempah-rempah, bersedia melakukan apa saja, termasuk perompakan dan menenggelamkan kapal-kapal Muslim yang mengangkut rempah-rempah yang dijumpainya di lautan (Van Leur, 1957:113). Tujuannya adalah untuk menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi di pasaran.

Pada abad ke-16, Eropa diguncang oleh gerakan Reformasi. Legalitas Paus (sebagai pemimpin keagamaan di seluruh dunia), yang hanya melegitimasi politik Spanyol dan Portugis, mendapat perlawanan dan pemberontakan. Gerakan Reformasi telah melahirkan agama Kristen Protestan, yang mendapat dukungan dari gerakan nasionalis di kalangan bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman.

Belanda pada waktu itu, yang meliputi seluruh dataran rendah di sepanjang pantai sejak dari Hollandia, Belgia, dan bagian utara Perancis, merupakan federasi yang terdiri dari kota-kota merdeka dengan wilayah 17 provinsi (Hayes, 1979:24). Kota-kota itu adalah Holland, Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Brussel, Utrecht, dan lain-lain, semuanya merupakan wilayah Spanyol. Pada tahun 1567, gerakan Reformasi berubah menjadi perang agama di Eropa. Akibatnya, kekuasaan Paus dalam imperium Romawi Suci mengalami kemerosotan (Van End, 1993).

Etika Protestan, seperti yang digambarkan Max Weber, sangat menghormati orang-orang kaya, karena diyakini sebagai tanda berkat Allah bersamanya. Sebaliknya, orang yang miskin merupakan suatu tanda dijauhi Allah, oleh karena itu dicemooh oleh masyarakat di sekelilingnya. Etika Protestan telah

mendorong petualangan-petualangan bangsa Belanda untuk giat berdagang (Chaudhuri, 1995).

Namun mereka sangat terpukul pada tahun 1580, ketika Phillip II, Raja Spanyol, menutup pelabuhan Lisabon untuk mereka. Hal ini telah mendorong Belanda Utara, pada tahun 1581, memproklamasikan kemerdekaannya sebagai Republik Bataaf.¹ Pada tahun 1588, Belanda, setelah bersekutu dengan Inggris, berhasil mengalahkan Spanyol. Namun beberapa tahun sesudah itu, Belanda juga bermusuhan dengan Inggris dan Portugis.

Belanda membutuhkan dana untuk membiayai perang; oleh karena itu, Belanda melakukan pelayaran-pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Pada mulanya Belanda berlayar ke Laut Utara, menghindari pertemuannya dengan pelaut-pelaut Spanyol dan Portugis; namun terhalang kutub utara yang tertutupi salju abadi, maka akhirnya orang-orang Belanda berlayar ke selatan mengitari benua Afrika.

Demikianlah, pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan rombongan tiba di Makassar, Sulawesi Selatan; dan ketika kembali ke negeri Belanda, mereka singgah di Banten, ujung barat pulau Jawa. Mereka telah memperhitungkan bahwa pelayaran niaga ke Nusantara akan menjadikan mereka kaya-raya. Gagasan ini didukung oleh Johan van Oldenbarnevelt, yang berupaya mempersatukan seluruh perusahaan-perusahaan Belanda untuk mengumpulkan dana pembangunan angkatan perang.

Gagasan ini diterima oleh pemerintah (*Staten Generaal*), maka pada tanggal 20 Maret 1602, didirikanlah *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), yang memiliki hak *Oktroi*, yakni hak mencetak uang, membangun militer, dan menentukan kebijakan perdagangan sendiri. Langkah ini diikuti oleh Inggris yang juga mendirikan *East India Company* (EIC). Keduanya berambisi untuk menguasai perdagangan dunia.

¹Namun Spanyol baru mengakui kemerdekaan Republik Belanda pada tahun 1648.

KONTRAK SOSIAL DAN PERTUMBUHAN KERAJAAN- KERAJAAN ISLAM DI SULAWESI SELATAN

Kondisi *homo homini lupus* ada juga di Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan. Keruntuhan Majapahit pada abad ke-16 menyebabkan kondisi sosial dan ekonomi kacau, akibat dari tidak adanya jaminan keamanan, berlangsung berkepanjangan. Dapat dipahami jika mitos *I Lagaligo*, yang berkembang di Luwu, Sulawesi Selatan, yang mengisahkan Sawerigading, dan tokoh-tokoh lainnya dalam mitos, di sepanjang pelayarannya ke negeri Cina, selama bertahun-tahun, selalu menjumpai musuh dan terlibat perang. Orang-orang Majapahit yang pada mulanya menjaga keamanan di lautan telah berubah menjadi bajak laut.²

Perang-perang merupakan upaya menciptakan tatanan politik yang menjamin kehidupan yang sejahtera, tertib, dan damai. Hal ini banyak dilakukan oleh kerajaan Luwu, yang melakukan berbagai ekspansi ke negeri tetangganya. Keberhasilan Luwu telah mengantarkannya sebagai kerajaan yang disegani di Sulawesi Selatan, sehingga menggiatkan negeri-negeri lain untuk menggunakan mitologi *I Lagaligo* untuk melegitimasi kekuasaan mereka dengan menciptakan mitos tentang *To Manurung*.

Kesusahan dan kesengsaraan itu menyebabkan timbulnya harapan akan kehadiran seorang pemimpin yang melindungi mereka. Dalam kondisi ini, munculnya *To Manurung* (orang yang turun dari langit) telah diangkat sebagai raja oleh kepala-kepala *wanua* di Sulawesi Selatan. Kisah sosok *To Manurung* ini bersumber dari mitologi *I Lagaligo*. Berawal dari mitos *I Lagaligo* itu selanjutnya bermunculan

²Penemuan patung perunggu Buddha di pedalaman Sulawesi Selatan merupakan bukti bahwa pada zaman Hindu-Buddhia terdapat hubungan-hubungan ekonomi antara Sulawesi Selatan dengan kerajaan Majapahit yang sudah mapan di Jawa. Patung ini memiliki ukuran lebih besar dari orang dewasa dan menjadi patung terbesar koleksi Museum Nasional Jakarta. Apabila dikaji lebih seksama akan berkembang pertanyaan: bagaimana patung itu dapat berada di Sulawesi Selatan, siapa yang dengan susah-payah membawanya ke Sulawesi Selatan, bagaimana caranya dan digunakan untuk apa?

kisah-kisah tentang *To Manurung*, yang sesungguhnya menjelaskan asal-mula suatu kerajaan. Pengangkatan seorang raja dilakukan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan kontrak sosial.

Di Gowa, *To Manurung* adalah seorang perempuan yang ditemukan di desa Takabassia, di dalam rumpun bambu. Kehadirannya diawali dengan hujan lebat, guntur sambung-menyambung, dan kilat menyambar-nyambar. Atas permintaan ketua-ketua *wanua*, ia diangkat sebagai raja. Dalam kontrak pengangkatan raja terjadi dialog antara *To Manurung* dan *Pacallaya* (ketua para *wanua*), sebagai berikut:

To Manurung, antara lain, menyatakan: "Kini kamu jadikan kami rajamu, kami akan bersabda dan engkau akan tunduk patuh. Kami ibarat angin, engkau adalah dedaunan". Pada pihak lain, *Pacallaya* menyatakan: "Kini kami mempertuan engkau, hanya diri pribadi kami mempertuan engkau, harta benda kami tidak. Engkau tidak akan mengambil ayam kami dari tempatnya bertengger, tidak akan mengambil telur ayam dari pekarangan kami [...]" (dalam Tika, Syam & Rosdiana, 2007).

To Manurung ini akhirnya bertemu dengan *Karaeng Bayo*, yang datang dari Bantaeng. Jika *To Manurung* berasal dari dunia atas, maka dari namanya, *Karaeng Bayo*, menunjukkan bahwa ia datang dari dunia bawah. Dengan kontrak ini maka organisasi politik yang semula berbentuk konfederasi yang longgar, akhirnya berubah menjadi negara kesatuan. Masyarakat komunal yang otonom berubah menjadi ikatan persekutuan yang demokratis.

Dengan kontrak sosial itu juga bermakna bahwa kekuasaan raja bukan untuk mengeksploitasi rakyatnya, tetapi, sebaliknya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bertolak dari kontrak sosial itu, raja terdorong untuk mengembangkan perekonomian rakyatnya melalui berbagai upaya yang melibatkan para ketua *wanua*, yakni para pejabat yang bergelar *Karaeng*, *Arung*, atau *Datu*. Akibatnya, muncul negara atau kerajaan yang bersifat ekspansif.

Mitos-mitos tentang *To Manurung* ini ditemukan di hampir seluruh kerajaan di

Sulawesi Selatan, termasuk Tanete, Wajo, Bone, Bantaeng, Toraja, Gowa, dan lain-lain. Semua kerajaan mengklaim sebagai memiliki kedaulatan yang berasal dari para dewa. Akibatnya, perang-perang antar kerajaan pun terjadi. Orang Mandar menyebut kondisi ini sebagai *si anre balie tauwe*, artinya ikan yang besar memangsa ikan yang kecil.

Masyarakat komunal dapat sentuhan kapitalis, dan upaya mendirikan kerajaan yang demokratis dan ekspansif dalam masyarakat yang pada mulanya berorientasi agraris, kini berubah menjadi kerajaan maritim. Dan kerajaan Gowa berkembang menjadi kekuatan kapitalis.

Demikian juga Bone, yang akhirnya berhasil melegitimasi kekuasaannya dengan mitos *To Manurung*, dan berkembang menjadi kerajaan besar yang patut diperhitungkan. Raja Dewa menghadapi Bone yang bersekutu dengan Wajo. Persekutuan dengan Wajo diperoleh dengan cara menyerahkan Larompong, Malluse, dan Sallo kepada Wajo. Kebaikan ini diterima oleh Wajo sebagai sikap persaudaraan antara orang tua dan anaknya. Sebagai imbalannya, Wajo membantu Luwu dalam menaklukkan Sidenreng. Sesudah itu, Luwu (di bawah Latenrisuki), menyerang Bone, walaupun dapat dikalahkan. Hal ini merupakan awal persekutuan antara kerajaan Luwu dengan kerajaan Gowa.

Perkembangan Sesudah Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan. Awal abad ke-16 merupakan babakan baru dalam sejarah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1511, Malaka jatuh kepada kekuasaan Portugis.³ Migrasi besar-besaran terjadi ke kota-kota pantai di pesisir utara pulau Jawa, Sumatra, Selat Makassar, dan lain-lain.

Pilihan untuk tinggal di jazirah Sulawesi Selatan sangat tepat, karena relatif aman dari ancaman Portugis. Pada masa ini Islam belum masuk ke Sulawesi Selatan, sehingga tidak terjadi permusuhan dengan Portugis.

³Misionaris Portugis yang tiba di Makassar berpendapat bahwa daerah yang disebut Makassar sangatlah kecil. Artinya, kebesaran Makassar baru dicapai sesudah itu. Lihat, selanjutnya, artikel berjudul "Makassarcshe Histories" dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land, en volkenkunde* (1855); dan Th. Van End (1993).

Sebaliknya, Gowa melarang permusuhan di antara para pendatang di negerinya. Peran komunitas Melayu berperan penting dalam syiar Islam. Lebih dari itu, justru turut membangun peradaban dan melibatkan diri dalam berbagai ekspansi militer Gowa. Penduduk Bugis-Makassar masih belum Islam pada masa itu dan belum lazim berpakaian, sementara para pendatang yang Muslim telah berpakaian mewah.

Keberadaan orang-orang Melayu berperan penting bagi pengembangan pelayaran-pelayaran niaga, karena kehidupan mereka sejak kedatangannya adalah berdagang, bahkan berpengalaman dalam pelayaran niaga internasional. Oleh karena itu di Gowa, orang Melayu diangkat sebagai *syahbandar*. Kehadiran mereka telah berdampak pada kemajuan kerajaan Siang dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan lainnya di pantai barat Selat Makassar (ANRI, 2003).

Gowa dibawah *Karaeng Tumapa'risi' Kallonna* (1510-1546), ibunya adalah I Rerasi, bangsawan tinggi dari Mandar, memindahkan ibukota kerajaan dari Tamalate di pedalaman ke Somba Opu di muara sungai Garrasi. Ia menyusun undang-undang dan peraturan dalam peperangan. *Karaeng Tumapa'risi' Kallonna* mengembangkan kerajaan dengan menaklukkan kerajaan Tallo, kerajaan tetangganya. Setelah tercipta kedamaian, ia menyatakan dengan sumpah: "Siapa saja yang mencoba membuat Gowa dan Tallo saling melawan (*ampasiewat*) akan mendapat hukuman Dewata" (dalam Depdikbud, 1985/1986).

Gabungan kedua kerajaan itu disebut sebagai Kerajaan Makassar, yang berslogan "dua raja, atas satu rakyatnya". Semenjak itu, Raja Tallo berkedudukan sebagai *Mangkubumi* (Perdana Menteri) Kerajaan Gowa. Penaklukan *Karaeng Tumapa'risi' Kallonna* tidak sebatas di Sulawesi Selatan, melainkan juga ke Sulawesi Barat.

Tunipalangga Ulaweng (1546-1565) juga menaklukkan kerajaan-kerajaan di Selat Makassar, seperti Siang, Suppa, Bacukiki, Sawitto, Sidenreng, dan Napo. Ia juga menaklukkan kerajaan-kerajaan di bagian Selatannya, yakni Panaikang, Bajeng,

Lengkesse, Polombangkeng, dan Bulukumba, serta kerajaan-kerajaan di teluk Bone seperti Larnuru, Soppeng, dan Wajo, termasuk juga kerajaan di pedalaman, seperti Lamati dan Duri.

Rakyat mereka yang ditaklukkan dibawa ke Makassar dan dipersilahkan untuk tinggal dimana saja yang mereka sukai, terutama di daerah yang terletak antara Gowa dan Tallo (Andaya, 2004:33). Kebijakan ini merupakan upaya sentralisasi ekonomi yang bertujuan untuk efisiensi perdagangan.

Dengan mengunjungi Makassar maka pedagang dapat memperoleh berbagai macam komoditas dagang dalam jumlah besar. Pedagang tidak perlu mengunjungi banyak pelabuhan untuk mendapatkan komoditas dagangnya. Jumlah penduduk yang besar tidak hanya merupakan kekuatan ekonomi, tetapi juga merupakan sumber daya manusia untuk kekuatan militer. Sesungguhnya, tidak hanya kedua raja yang melakukan ekspansi ke negeri tetangga. Hal ini juga dilakukan oleh kerajaan-kerajaan dari Luwu, Bone, Wajo, bahkan oleh Ternate di Maluku Utara dan Bima di Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian, tidak hanya Gowa yang agresif, hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan terlibat dalam perang untuk menunjukkan eksistensi mereka. Akhirnya, pada abad 16 berkembang empat kekuatan besar, yakni: Gowa dan Tallo (kerajaan kembar) di selatan jazirah Sulawesi Selatan; di bagian tengah terdapat Bone, Soppeng, dan Wajo, yang, tergabung dalam persekutuan *Tellumpocoe*; serta di utara terdapat dua kekuatan besar, yakni Luwu di bagian timur tengah dan Mandar di bagian barat. Persekutuan *Tellumpocoe* mampu menandingi kekuatan Gowa-Tallo, tetapi ketika proses Islamisasi berlangsung, Wajo memihak Gowa. Akhirnya, persekutuan Bone-Soppeng dapat dikalahkan oleh Gowa-Tallo (Mappangara, 2001 dan 2014).

Konsekwensinya, masyarakat di Sulawesi Selatan tersusun dalam tiga strata sosial, yakni bangsawan, orang yang bebas, dan budak. Mereka yang unggul dan memiliki harga diri menepati sistem pelapisan sosial

tertinggi. Mereka yang menerima kekalahan dianggap tidak punya harga diri, dan kelompok ini adalah budak. Punya pengikut merupakan gaya hidup pada masa itu untuk membangun kerajaan. Semakin banyak pengikutnya, semakin tinggi kebanggaan seseorang atas harga dirinya (Mattulada, 1985; dan Tol, van Dijk & Acciaoli, 2009).

Demi *siri* (harga diri), seseorang berperang dan berupaya mendapat sebanyak mungkin pengikut. Agar supaya harga diri tidak merosot, maka seseorang selalu berupaya menepati janjinya. Hidup sebagai majikan dan golongan bersenjata, atau orang berani (*to barani*), sudah tentu merupakan orang terhormat, yang mendapat penghargaan sebagai bangsawan (Mattulada, 1985; dan Pelras, 2006).

H.J. Fredericy (1933) juga menyatakan bahwa tidak pantas orang yang telah mengangkat senjata menggarap tanah atau pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, penduduk dari kalangan negeri taklukan akan berupaya menjadi orang berani yang membela kerajaan. Namun sebaliknya, orang atau negeri yang berulang-ulang melakukan pemberontakan akan diperlakukan sebagai budak, yang bahkan dapat diperjual-belikan.

Sistem nilai *siri* ini mampu menjamin kerajaan Gowa untuk berkembang. Penaklukan bukan untuk menanamkan dendam, melainkan merupakan upaya untuk memperoleh tenaga militer dan sumber kekayaan. Seorang prajurit yang pulang membawa tawanan, yang kemudian dijadikan sebagai prajurit yang setia kepada penakluknya, merupakan suatu kebanggaan. Demi *siri* (harga diri), semua orang Makassar bercita-cita untuk memiliki budak agar terbebas dari pekerjaan fisik (Tol, van Dijk & Acciaoli, 2009:87).

Dengan budak, seseorang dapat mengolah tanah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang seharusnya ia kerjakan. Oleh karena itu, budak merupakan kekayaan dan harga diri seseorang. Seperti yang tampak pada *Syair Perang Mengkassar*, tingkat kebangsawanan orang Makassar khususnya ditandai dengan jumlah pengikutnya yang banyak (dalam Mattulada, 2002). Tidak ada bangsawan berjalan ke istana tanpa

diiringi oleh para budaknya yang bersenjata. Mereka tidak akan mengampuni orang yang mengganggu hak dan kehormatan bangsawannya.

Semakin besar pengikutnya, semakin tinggi kebanggaan dan kebangsawanannya. Hal ini tampak tidak hanya ketika terjadi perang, pada masa kondisi damai pun kepergian seorang bangsawan dan pejabat pemerintahan selalu diikuti dengan sejumlah besar pengikutnya, yang diiringi dengan bunyi-bunyian musik yang dimainkan oleh para pengikut mereka (Rahim, 1985; dan Sulisty, 2011).

Mengenai Perang Makassar. Pada awal abad ke-17, konflik perebutan perdagangan rempah-rempah semakin meningkat. Pada tahun 1603, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau Kompeni Dagang Belanda) menguasai pulau Banda di Maluku, yang kemudian dijadikan sebagai pusat kekuasaannya di Asia Tenggara (Kartodirdjo, 1988; dan Reid, 2002).

Pendudukan VOC atas Banda diikuti dengan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku Selatan. Sementara itu, Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara (Amal, 2007). Perkembangan ini berakibat bahwa kedudukan Portugis, yang mengontrol perdagangan rempah-rempah di bandar-bandar Italia, mulai tergeser oleh VOC Belanda.

Ambisi VOC untuk menyingkirkan musuh-musuhnya bangsa Eropa tidak dapat dilakukan, karena Sultan Gowa menjamin perdamaian dan seluruh bangsa-bangsa dilindungi jika berkunjung ke Somba Opu, pelabuhan Kerajaan Gowa-Tallo. Baik Portugis maupun Belanda, kemudian, menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal Muslim yang dijumpainya dalam pelayaran menuju ke pelabuhan Somba Opu di Makassar (Rahman Hamid, 2008:20; dan Tol, van Dijk & Acciaoli, 2009:22).

Pada tahun 1603, yang dapat dilakukan oleh VOC adalah meminta ijin kepada Sultan Alauddin dari Kerajaan Gowa-Tallo untuk membuka kantor dagang di Makassar. Atas ijin Sultan Alauddin, Class Leursen membuka kantor dagang di Somba

Opu, dengan syarat tidak melanjutkan permusuhannya dengan bangsa Portugis dan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya di Gowa (Reid, 2002; dan Tol, van Dijk & Acciaoli, 2009). Namun konflik tak terhindarkan, yang meningkat menjadi larangan berdagang bagi VOC pada tahun 1616, dan akhirnya penutupan loji VOC di Somba Opu atas perintah Sultan Alauddin.

Kedudukan VOC semakin mapan pada tanggal 30 Mei 1618, ketika Jan Pieter Zoen Coen merebut Jakarta dari Kesultanan Banten di pulau Jawa bagian barat. Jakarta selanjutnya diubah menjadi Batavia dan menjadi pusat kedudukan VOC di Asia. Di Batavia ini tinggal Gubernur Jenderal VOC dan *Raad van Indie* (Dewan Hindia Belanda), selaku lembaga legislatif Belanda di Asia, sedangkan di pulau Banda ditempatkan pejabat dengan pangkat Gubernur.⁴

Pada tahun 1650, sikap dan tindakan VOC mulai semakin keras dengan upayanya untuk menyerang Gowa dan merebut Benteng Panakkukang. Namun, yang mendorong perang itu terjadi sebenarnya adalah ketika VOC dapat bersekutu dengan Ambon, Ternate, Buton, dan Bone pada tahun 1665. Pada waktu yang bersamaan, Portugis juga terdesak kedudukannya dari Maluku. Sebaliknya, Gowa menjadi sangat kuat ketika bersekutu dengan Mandar, Wajo, Luwu, Bantaeng, dan Turatea. Namun perkembangan baru mulai terjadi ketika Gowa-Tallo harus berhadapan dengan VOC dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, perang tidak dapat dihindari.

Perang dimulai ketika di Eropa, Belanda terlibat dalam pertempuran melawan Inggris. Gowa menyerang Buton, Muna, Banggai, Tombuku, dan Sula, bahkan

⁴Di Batavia (sekarang Jakarta) dibentuk pemerintahan yang dinamai *Residensi Hogere Regeering* (sebutan Gubernur Jenderal bersama *Raad van Indie*). Reorganisasi pimpinan dilakukan pada tahun 1609, ketika kekuasaan central VOC di Asia diserahkan kepada Gubernur Jenderal yang didampingi oleh *Raad van Indie*. Mengenai ini lihat, misalnya, "The Archives of the Dutch East India Company and the Local Institutions in Batavia" dalam *Arsip VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dan Lembaga Pemerintahan Kota Batavia, Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]; "De Archieven van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Locale Instellingen to Batavia Jakarta"* dalam *Nationaal Archief, The Hague: National Archive of the Netherlands;* dan G.L. Balk *et al.* (2007:11).

Ambon di Maluku; selanjutnya, seperti biasa, mengangkut penduduknya ke Gowa (Zuhdi, 2010). Hal ini telah mendorong pembalasan oleh VOC.

Perang dimulai pada tanggal 24 November 1666. Setelah menyerang Gowa dan Bantaeng, kontingen Bugis-Makassar yang bersekutu dengan VOC menyerang kekuatan Gowa di Buton. Gowa dikalahkan dan lebih dari 5,000 pasukannya gugur. Serangan selanjutnya terjadi sejak tanggal 1 Agustus 1667 hingga 10 November 1667. Gowa akhirnya dikalahkan, sehingga terpaksa menandatangani Perjanjian Bungaya (Andaya, 2004; Rahman Hamid, 2008; dan Tol, van Dijk & Acciaoli, 2009).

Namun perang nampaknya tidak tuntas dengan adanya Perjanjian Bungaya. Kekuatan Gowa dan sekutunya masih sangat besar, maka akhirnya meletus kembali perang berikutnya. Perang-perang ini terjadi sampai dengan bulan November 1669, dan baru berakhir ketika benteng Somba Opu dihancurkan dan diratakan dengan tanah oleh pihak VOC dan sekutu-sekutunya. Sultan Gowa menyerah. Namun, para panglima perangnya yang tidak mau menyerah harus eksodus dan berjuang di luar Makassar, yakni di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan pulau Jawa. Makassar menerima kekalahan dalam perang tersebut, dan dua pertiga penduduk Makassar menjadi budak, sehingga Makassar dikenal menjadi bandar pengeksport budak (Andaya, 2004; Rahman Hamid, 2008; dan Tol, van Dijk & Acciaoli, 2009).

Sesudah perang Makassar, VOC mendapat kekayaan dan tenaga militer yang tangguh di Nusantara. VOC semakin berkuasa di Indonesia dan mendapat sekutu dari seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan. Kekayaan ini akan menjadi modal untuk menaklukkan Mataram, suatu kerajaan Islam di Jawa dengan penduduk terbesar di Nusantara (Sasmita, 1977; Kartodirdjo, 1988; dan Reid, 2002).

VOC mampu membuktikan diri sebagai bangsa yang unggul di Nusantara. Dengan demikian, VOC tidak hanya berhasil merebut monopoli perdagangan, tetapi

juga menempatkan kekuasaan politiknya sebagai pemegang kedaulatan di kawasan timur Nusantara. Ia tetap mempertahankan adanya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Gowa, tetapi tidak lagi diberi kesempatan untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya, terutama dalam aktivitas pelayaran niaga yang bebas tanpa kendali dari VOC. Struktur kelembagaan politik pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dipertahankan, tetapi pengawasan dan pembatasan hubungan dengan dunia luar ada di tangan VOC (ANRI, 1973; dan Amir, 2011).

KESIMPULAN

Pembangunan masyarakat, konflik, dan perang, yang menjadi latar belakang Perang Makassar pada abad ke-17, merupakan ekspresi dari harga diri. Pembangunan masyarakat, sudah barang tentu, dimulai dengan membentuk *polity* (entitas politik), seperti kerajaan atau negara, dengan Raja yang dipilih oleh kepala-kepala *wanua*. Bentuk federasi diubah menjadi kerajaan atau kekuasaan yang sentralistik. Ibukota kerajaan selanjutnya dipindahkan dari pedalaman ke pesisir, di muara sungai. Artinya, sistem kekuasaan yang semula berorientasi agraris selanjutnya berorientasi maritim.

Sesudah itu, proses pembangunan kerajaan dilakukan dengan jalan ekspansi dan penaklukan, serta mengangkut penduduk negeri taklukan tersebut ke ibukota kerajaan. Proses ekspansi dan penaklukan ini juga menciptakan hubungan perkawinan, dengan menempatkan keluarga bangsawan dari Gowa di negeri *vazal*, serta membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan negeri *vazal*. Gejala ini merupakan hal yang umum dan tidak sebatas di Gowa saja, tetapi juga di kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, bahkan dalam beberapa hal merupakan fenomena umum di seluruh dunia.

Kerajaan Gowa dibangun dengan penaklukan dan mengangkut penduduknya ke ibukota kerajaan. Kebijakan Gowa berikutnya adalah membangun hubungan kekerabatan di kalangan keluarga elite

antara *vazal* dan negeri induk, menciptakan perjanjian (seperti dengan Mandar), sanksi bagi yang melanggar (seperti dalam kasus Buton dan Bone), serta membangun struktur pemerintahan yang representatif (seperti posisi dan gelar *Tumakajanang*, *Jannang*, dan *Mangkubumi* dengan Tallo). Perkembangan ini menciptakan masyarakat dengan sistem aristokratis. Masyarakat komunal berubah menjadi kerajaan yang kapitalis. Kepala *wanua*, yang pada mulanya hanya menjadi pemimpin kerabat di wilayah, berubah menjadi pemimpin politik yang berorientasi ke luar dari wilayah kekuasaannya.

Di Sulawesi Selatan, kelas penguasa terdiri dari orang-orang yang bangga dengan status, menyadari hak dan kewajibannya, serta berpikir dan bertindak sebagai orang merdeka. Gaya hidup bangsawan itu diikuti juga oleh *orang merdeka*. Memiliki budak menjadi gaya hidup, yang diikuti tidak hanya di Gowa, tetapi juga di seluruh negeri taklukannya. Para panglima perang dari negeri *vazal* juga memiliki pengikut. Bagi para pengikut, adalah lebih membanggakan jika dikasihi daripada menjadi pengikut karena suatu hukuman. Hubungan antara atasan dan bawahan bukan dalam bentuk majikan dan budak, tetapi hubungan anatara majikan dan pengikut (dalam bahasa Makassar disebut *punggawa* dan *sawi*). Pengikut membutuhkan *punggawa* yang mampu melindungi dan menjamin kehormatannya.

Sistem sosial demikian adalah merupakan produk zamannya. Berbagai ekspansi militer diperlukan untuk memperkokoh status seseorang, dengan memperbanyak pengikut. Sebaliknya, pengikut akan bersikap setia kepada majikan atau *punggawa*, supaya tidak berubah statusnya menjadi terhina sebagai budak. Budak adalah orang yang tidak memiliki harga diri, ia layaknya bangkai yang berjalan. Dengan pandangan seperti ini kita bisa memahami bahwa perang tidak selalu mengakibatkan suatu kerajaan itu menjadi lemah. Sebaliknya justru menjadi kuat, karena melalui perang itulah suatu kerajaan akan memperbanyak pengikut, yang merupakan sumber tenaga kerja dan tenaga militer bagi suatu kerajaan.

Bibliografi

- Amal, M. Adrian. (2007). *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara, 1250- 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia.
- Amir, Muhammad. (2011). *Konflik Balanipa – Belanda di Mandar, 1862-1872*. Makassar: Fakultas Pasca Sarjana UNHAS [Universitas Hasanuddin] Makassar.
- Andaya, Leonard Y. (2004). *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar: Inninawa bekerjasama dengan Media Kajian Sulawesi, terjemahan.
- ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]. (1973). *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.6.
- ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]. (2003). *Bahasa Melayu sebagai Bahasa Resmi dan Menyurat Formal Raja, Surat, dan Diplomasi*. Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber.
- Artikel berjudul “Makassarcshe Histories” dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land, en volkenkunde* (1855).
- Balk, G.L. et al. (2007). *The Local Institutions in Batavia, Jakarta*. Leiden: Leiden University Press.
- Chaudhuri, K.N. (1995). *The Trade and Civilization in the Economic History from the Rise of Mamluk to 1750*. New York: Cambridge University Press.
- “De Archieven van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Locale Instellingen to Batavia Jakarta” dalam *Nationaal Archief*. The Hague: National Archieve of the Netherlands.
- Depdikbud [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan]. (1985/1986). *I Lagaligo: Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallo (Naskah Makassar)*. Ujung Pandang: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Fredericy, H.J. (1933). “De Standen bij de Boeginezen en Makassarren” dalam *Bijdragen tot de Taal Land- en Volkenkunde van Nederland-Indie*, Deel 90. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Hayes, Carlton J.H. (1979). *Sejarah Eropa Moden hingga 1870*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, terjemahan.
- Kartodirdjo, Sartono. (1988). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium ke Imperium*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Mappangara, Suriadi. (2001). *Glosarium Sulawesi selatan*. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Mappangara, Suriadi. (2014). “Perjanjian Tellumpocoe Tahun 1582: Tindak-Balas Kerajaan Gowa terhadap Persekutuan Tiga Kerajaan di Sulawesi Selatan” dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 7(1) Mei. Bandung: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, dan UNIPA Surabaya.
- Mattulada. (1985). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Mattulada. (2002). *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pelras, Cristian. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum-Jakarta-Paris Ecole Francaise d'Extreme Orient, terjemahan.
- Rahim, Rahman. (1985). *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Hassanuddin University Perss.
- Rahman Hamid, Abd. (2008). *Jejak Arung Pallaka di Negeri Buton*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Reid, Anthony. (2002). *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Jakarta: Penerbit LP3ES, terjemahan.
- Sasmita, Uka Tjandra. (1977). "Kedatangan Islam dan Pertumbuhan Kota-kota Muslim di Pesisir Kepulauan Indonesia" dalam *Al-Djamiah: Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, Th.XV. Yogyakarta: IAIN [Institut Agama Islam Negeri] Sunan Kalijaga.
- Sulistyo, Bambang. (2011). *Makassar Multikultur*. Makassar: Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Pemerintah Kota Makassar.
- "The Archives of the Dutch East India Company and the Local Institutions in Batavia" dalam *ArsipVOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dan Lembaga Pemerintahan Kota Batavia*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- Tika, Zainuddin, M. Ridwan Syam & Z. Rosdiana. (2007). *Profil Raja-raja Gowa*. Makassar: Penerbit Refleksi.
- Tol, Roger, Kees van Dijk & Greg Acciaoli. (2009). *Kuala dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Jakarta: KITLV Press, terjemahan.
- Van End, Th. (1993). *Ragi Caritas: Sejarah Gereja di Indonesia, 1500-1860*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, terjemahan.
- Van Leur, J.C. (1957). *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Sosial and Economic History*. The Hague: Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde.
- Zuhdi, Susanto. (2010). *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Kebudayaan Masyarakat Buton dan Rajawali Pers.